

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Provinsi Jawa Tengah

Halaman 8

Belanja Tak Langsung Habiskan Rp15 Triliun

APBD Jateng 2018

SEMARANG - Belanja tak langsung masih mendominasi porsi anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Jateng tahun 2018. Dari KUA PPAS yang telah disepakati Rp 24,3 triliun, lebih dari 60 persennya masuk dalam pos belanja tersebut.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Ahmadi, mengatakan, komponen belanja tak langsung di antaranya belanja gaji pegawai, hibah, bansos, bagi hasil kabupaten/kota, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Komponen gaji paling mendominasi.

"Porsi anggaran banyak di belanja tak langsung. Lebih dari 60 persen," kata Ahmadi, kemarin.

Tahun ini komponen gaji akan semakin

besar lantaran ada penambahan pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai konsekuensi peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke Pemprov.

Sebagai gambaran, dalam APBD 2017, porsi belanja tak langsung Rp 17,39 triliun dari total APBD Rp 23,4 triliun. Dari angka Rp 17,39 triliun itu, Rp 5,719 triliun untuk gaji pegawai.

Lantaran peralihan kewenangan, bisa jadi kebutuhan anggaran gaji pada 2018 lebih besar dari tahun ini.

Apalagi pada APBD Perubahan 2017 lalu, Dinas pendidikan dan Kebudayaan mengajukan penambahan Rp 298,81 miliar menjadi Rp 5,016 triliun untuk memenuhi gaji dan tunjangan tenaga pendidik.

KUA PPAS, lanjut Ahmadi, menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD 2018. Dalam penyusunan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah. Satu hal yang ia tekankan adalah upaya menurunkan angka kemiskinan.

Kemiskinan

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, prioritas belanja KUA PPAS untuk infrastruktur. Namun nominalnya turun dibandingkan APBD 2017. Prioritas kedua adalah program penurunan kemiskinan. Tak cukup dengan cara-cara konvensional, berbagai inovasi terus digali dan dilakukan.

"Kemiskinan menjadi fokus ke depan. Kerja teknokratik kita mesti didorong ke arah itu. Kita harus pikirkan cara-cara yang tidak konvensional untuk mengatasinya," terang Ganjar.

Ganjar memaparkan, selain penurunan

angka kemiskinan, ada beberapa indikator pembangunan yang perlu upaya keras untuk mencapainya.

Seperti produksi kedelai dan tebu, pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), produksi perikanan budidaya, penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), peningkatan prestasi olahraga hingga penurunan angka kematian akibat DBD.

Untuk itu, ia meminta Bappeda bermitra dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) maupun perguruan tinggi untuk melakukan

pengkajian hingga rekayasa teknologi guna mencari solusi. (H81-39)

